

PENILAIAN SITUS PEMERINTAH DAERAH DI PROVINSI DKI JAKARTA, BENGKULU, JAMBI, DAN BANGKA BELITUNG

Hanif Hoesin¹⁾, Herald Setiadi²⁾, Nurjannah Andi Lemmung³⁾,
Prima A.Tonandriv⁴⁾, Abdulloh⁵⁾

¹⁾ Kepala BPPI II Depkominfo, e-mail : greatpaduka@yahoo.com

²⁾ Peneliti E-Gov dan Praktisi IT, e-mail : heraldpana@yahoo.com

³⁾ Konsultan Riset, e-mail : andi_lemmung@yahoo.com

⁴⁾ Konsultan Riset, e-mail : prima@risetprima.com

⁵⁾ Peneliti E-Gov dan Praktisi IT, e-mail : abdulloh@jobitcom.com

Abstrak

Kebijakan otonomi daerah menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang berisikan kewenangan daerah otonom memungkinkan daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan perundang-undangan. Dalam hal percepatan pengembangan potensi daerah, pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi yang tepat, terarah, serta berkelanjutan diharapkan memberikan nilai tambah tersendiri. Melalui Inpres No. 3 Th 2003, pemerintahpun – dalam hal ini Departemen Komunikasi dan Informatika – telah menetapkan Kebijakan dan Strategi Nasional tentang pengembangan e-government. Implementasinya dalam teknologi informasi diantaranya adalah pengembangan situs web pemerintah daerah.

Menurut Catatan Depkominfo (2007) menunjukkan bahwa jumlah situs web pemerintah (pusat dan daerah) mencapai 224 buah. Sebanyak 201 situs dapat diakses, dan sisanya 23 buah situs tidak dapat dibuka (www.kominfo.go.id). Meskipun demikian, sampai saat ini isi dari situs pemerintah daerah yang sudah dibangun itu belum diidentifikasi secara jelas. Isi dari situs, seperti informasi apa saja yang disajikan, apakah layanan online yang disediakan, bagaimana keterlibatan masyarakat dengan proses pembuatan kebijakan publik secara online, seperti apa fitur-fiturnya, belum didata/dikaji secara sistematis. Padahal, dari data tersebut kita dapat memperoleh gambaran mengenai sejauh mana perkembangan implementasi e-government di Indonesia. Lebih jauh lagi, berdasarkan data itu dapat dirumuskan langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk pengembangan isi situs pemerintah.

Penelitian kali ini dilakukan dengan melakukan kodifikasi konten situs pemerintah daerah dari tingkat propinsi hingga kabupaten dengan tujuan mengetahui profil situs pemerintah daerah, mengeksplorasi isi/content yang terdapat pada situs pemerintah daerah, mengetahui perbedaan isi/content yang terdapat pada situs pemerintah daerah, dan mengevaluasi isi situs pemerintah daerah. Penelitian dilaksanakan di Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Bangka Belitung, Provinsi Jambi, dan Provinsi Bengkulu, sesuai dengan wilayah kerja BPPI Depkominfo Jakarta. Metode analisa isi dan penilaian panelis dilaksanakan di DKI Jakarta, pelaksanaan in-depth interview terhadap pengelola e-government pemerintah daerah dilakukan di setiap provinsi tersebut. Semua situs pemerintah daerah yang berada di empat provinsi dijadikan populasi penelitian. Terdapat 12 buah situs yang aktif dan dapat di-coding dari 20 buah situs pemerintah daerah yang telah ditentukan. Untuk memperoleh cakupan informasi sesuai tujuan penelitian ini digunakan tiga pendekatan sekaligus yaitu pertama analisa isi (content analysis), lalu penilaian juri/panelis, dan ditambah wawancara mendalam (in depth interview). Analisa isi terhadap situs pemerintah daerah merupakan instrumen penelitian utama, sementara penilaian juri/panelis dan wawancara mendalam digunakan untuk melengkapi temuan analisa isi. Coding instrument yang dibuat mengacu pada coding instrument yang dibuat pada penelitian Zhou (2004). Penelitian ini mereplikasi penelitian analisa isi terhadap situs pemerintah daerah yang dilakukan Zhou di Cina. Yang didalamnya terdapat tiga kategori koding utama yaitu tiga tipe utama e-government: e-governance, e-service, dan e-knowledge.

Hasil penelitian menemukan bahwasanya situs pemerintah daerah yang dijadikan obyek penelitian sangat kaya akan informasi. Dua per tiga (62.3%) hyperlink yang terdapat pada situs pemerintah menyajikan informasi yang berasal dari pemerintah (fungsi e-knowledge). Sementara jumlah hyperlink yang dapat melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan pada pemerintah (fungsi e-governance) hanya seperempatnya (24.3%), dan hyperlink yang menyajikan layanan pemerintah secara online (fungsi e-service) hanya mencapai 13.4%.

Dengan hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan pembuatan kebijakan pengembangan isi situs pemerintah daerah serta sebagai tolak ukur objektif kuantitas dan kualitas isi situs pemerintah daerah.

Keyword : Situs Pemerintah Daerah, Analisa Content/Isi

1. PENDAHULUAN

Penerapan teknologi komunikasi dan informasi dalam pemerintahan, yang dikenal dengan sebutan *e-government*, diyakini akan memberikan keuntungan yang luas, tidak saja bagi negara dan para penyelenggaranya, tetapi juga bagi publik yang menerima layanan. Berbagai keuntungan penerapan *e-government* yang dapat diperoleh antara lain: (1) meningkatnya layanan publik; (2) meningkatnya akuntabilitas pemerintah; (3) berkurangnya biaya dan meningkatnya efektivitas; (4) terkendalinya transformasi prosedur operasi dan layanan publik; (5) meningkatnya pertumbuhan ekonomi; dan (6) meningkatnya kualitas hubungan antara pemerintah dengan masyarakat.

Bahwasanya pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi dalam proses pemerintahan akan meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan, telah disadari oleh Pemerintah Indonesia. Melalui Inpres No. 3 Th 2003, pemerintah – dalam hal ini Departemen Komunikasi dan Informatika – telah menetapkan Kebijakan dan Strategi Nasional tentang pengembangan *e-government*.

Implementasi dari Inpres No. 3 Th 2003 tersebut yang terlihat pada pengembangan *e-government* itu sendiri telah banyak mendapatkan perhatian dari berbagai kalangan. Kebanyakan perhatian tentang *e-government* itu lebih difokuskan pada pengembangan *e-government* itu sendiri, mulai dari pembuatan web yang interaktif, pembuatan web yang menyediakan transaksi layanan publik, pembuatan antar muka keterhubungan dengan lembaga lain, hingga rencana layanan *government-to-business* (G2B). Sementara kajian yang mengeksplorasi tentang isi (*content*) yang terdapat pada situs web pemerintah (provinsi, kota, kabupaten) secara sistematis masih jarang ditemukan. Padahal, dalam situs web terkandung jenis informasi dan layanan yang ditawarkan pemerintah kepada warganya (AGIMO, 2007).

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 E-Government (E-Gov)

Saat ini berbagai negara di dunia ini telah memulai mencoba menerapkan *e-government*. Mulai dari negara maju hingga negara berkembang, serta pemerintah pusat dan lokal bergegas menuju pemerintahan yang dijalankan secara *online* (Improvement & Development Agency [IdeA], 2002). Indonesia pun menjadi salah satu negara yang juga mencoba menerapkan *e-government*, meski belum secanggih yang diterapkan di negara maju. Keinginan mengembangkan *e-government* oleh Pemerintah telah dirumuskan dalam Inpres No. 3 tahun 2003 tentang “Kebijakan dan Strategi Pengembangan *e-Government*“. Sehingga sejak tahun tersebut, segenap pemerintah pusat dan pemerintah daerah telah mengimplementasikan penggunaan teknologi komunikasi dan informasi untuk melayani warganya.

1. Definisi E-Gov

Situs **The World Bank** tentang *e-government* mendefinisikan sebagai berikut “*E-Government refers to the use by government agencies of information technologies (such as Wide Area Network, the Internet and mobile computing) that have the ability to transform relations with citizen, businesses and other arms of government. These technologies can serve a variety of different ends: better delivery of government services to citizens, improved interactions with business and industry, citizens empowerment through access to information, or more efficient government management. The resulting benefits can be less corruption, increased transparency, greater convenience, revenue growth, and/or cost reductions* (The World Bank Group, 2003).

2. Fungsi E-Government

Sebuah studi tentang proyek *e-government* menemukan ada tiga kategori utama fungsi dari *e-government*: Ketiga kategori itu adalah *e-governance*, *e-service*, dan *e-knowledge*. Kategori *e-governance* merujuk pada keterhubungan warga, *stakeholders*, dan pejabat pemerintah untuk berpartisipasi dalam pengelolaan komunitasnya. Fungsi *e-service* lebih berfokus pada penyediaan layanan pemerintah secara *online* yang cukup aman. Sementara fungsi *e-knowledge* berarti menggunakan teknologi komunikasi yang bertujuan untuk mendapatkan pengetahuan (IDeA, 2002).

Fungsi utama *e-governance* adalah menjalankan fungsi pemerintahan melalui internet. Termasuk membangun keterhubungan pemerintah dengan warganya, yang dilakukan melalui fitur-fitur seperti forum diskusi *online*, *chat room*, dll.; dan membangun keterhubungan antar instansi pemerintah melalui fitur lain seperti intranet. *E-service* merujuk penyediaan layanan pemerintah secara *online*. Hal ini termasuk layanan bagi komunitas bisnis seperti permohonan ijin, dan konsultasi interaktif dengan pemerintah. Juga termasuk layanan bagi warga seperti permohonan ijin menetap, informasi cuaca, informasi kemacetan, juga layanan e-mail gratis. *E-Service* dapat pula berbentuk layanan pembuatan paspor, akte kelahiran, dan akses terhadap *database* pemerintah.

Sementara konsep *e-knowledge* merujuk pada penggunaan internet oleh pemerintah untuk mendiseminasikan informasi. Setidaknya ada lima jenis informasi yang harus terdapat dalam situs pemerintah daerah: (1) Informasi tentang tugas dan peranan pemerintah; (2) dokumen, file, database,

dan informasi yang dimiliki pemerintah; (3) informasi tentang jaringan pekerjaan administratif seperti pusat informasi/file elektronik; (4) informasi tentang kegiatan rutin pemerintah; (5) informasi tentang perdagangan dan transaksi yang terjadi di pasar. Bentuk lain dari *e-knowledge* adalah diseminasi informasi untuk membangun citra positif tentang pemerintah. Namun pengujian tentang *e-government* di beberapa negara lain menunjukkan bahwa seringkali terjadi tumpang tindih antara fungsi pengelolaan (*governance*), layanan (*service*), dan pengetahuan (*knowledge*).

3. Sektor E-Government

Para ilmuwan menyarankan ada tiga sektor yang terdapat pada *e-government*. Pertama, *Government-to-Citizens* (G2C) bertujuan untuk mempermudah warga berinteraksi dengan instansi pemerintah dalam berbagai hal, mulai memperoleh akte nikah, hingga pembayaran pajak. Kedua, inisiatif *Government-to-Business* (G2B) yang membantu memfasilitasi kegiatan bisnis seperti undangan lelang, perijinan, dan fasilitas bisnis lain yang menunjang pertumbuhan ekonomi. Ketiga, fungsi *Government-to-Government* (G2G) yang mendukung operasi kerja antar instansi pemerintah, termasuk berbagi data dan menjalankan pertukaran data secara elektronik antara instansi pemerintah.

4. Tahap Perkembangan E-Government

Dalam pengembangan *e-government*, setiap pemerintahan harus melalui berbagai tahapan implementasi teknologi dan kerumitan non teknis lainnya. Menurut Huang dan Bwoma (2003), pengembangan *e-government* merupakan sebuah model yang bertahap. Tahap utama meliputi: (1) publikasi informasi – pemerintah sekedar mempublikasikan informasi di situs mereka untuk dibaca oleh masyarakat; (2) komunikasi dua-arah – dimana warga dapat berkomunikasi dengan pemerintah dan mengajukan permintaan; (3) transaksi - situs *e-government* dapat melakukan pemrosesan transaksi; dan (4) integrasi – layanan publik antar departemen telah terintegrasi secara elektronik.

Watson & Mundy (2001), memperkenalkan konsep e-demokrasi, yang terdiri atas dua unsur: *e-government* dan e-politik. Dimana *e-government* menyediakan informasi dasar tentang pemerintah untuk masyarakat, e-politik merujuk pada penggunaan teknologi internet untuk meningkatkan efektifitas pengambilan keputusan dengan membuat “warga sadar tentang bagaimana dan mengapa dibalik pengambilan keputusan politik dan memfasilitasi warga untuk berpartisipasi dalam proses ini”. Konsekuensinya, tujuan akhir daripada *e-government* adalah untuk mengembangkan e-demokrasi dimana pemerintah dapat memberikan layanan publik secara efektif dan efisien.

Agarwal (2000), membagi pengertian **E-Gov** kedalam lima tahapan, yang semakin tinggi tahapannya, semakin kompleks permasalahan yang akan dihadapi:

1. **Tahapan yang paling awal** ditandai dengan munculnya berbagai situs hampir semua intitusi pemerintah. Pada tingkat awal ini, e-gov masih bersifat meng-informasikan tentang apa dan siapa yang berada didalam insitusi tersebut dan masih bersifat satu arah. Kondisi e-gov yang masih berada pada tahap awal ini belum bisa digunakan untuk membentuk suatu *good governance*.
2. **Tahapan kedua**, mulai ditandai dengan adanya transaksi dan interaksi secara online antara suatu institusi dengan masyarakat. Misalnya, masyarakat tidak perlu lagi antri membayar memperpanjang KTP, pengurusan administarsi publik, dsb. Semuanya bisa dilakukan secara online. Secara umum sudah terjalin komunikasi dua arah antara institusi pemerintah dengan masyarakat secara online.
3. **Tahapan ketiga** dari e-gov memerlukan kerja sama secara *online* antar beberapa instansi dan masyarakat. Sebagai contoh, apabila masyarakat sudah bisa mengurus perpanjangan KTP-nya secara online, selanjutnya mereka tidak perlu lagi melampirkan KTP nya lagi ketika mengurus passport atau membuat SIM.
4. **Tahapan keempat** dari e-gov sudah semakin kompleks bukan hanya memerlukan kerja sama antar institusi dan masyarakat, tetapi juga menyangkut arsitektur teknis yang semakin kompleks. Dalam tahap 4 ini, seseorang bisa mengganti informasi yang menyangkut dirinya hanya dengan satu klik secara otomatis, berlaku untuk setiap institusi pemerintah yang terkait.
5. **Tahapan kelima**, pemerintah sudah memberikan informasi yang terpaket (*packaged*) sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dalam hal ini, pemerintah sudah bisa memberikan apa yang disebut “*information-push*” yang berorientasi kepada masyarakat. Apa saja yang menjadi kebutuhan masyarakat, e-gov pada tahap ini bisa menyediakannya

5. Manfaat dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kesuksesan Implementasi E-Gov

Misra (2006) dalam jurnalnya yang dipaparkan dalam konferensi e-gov, secara detil menjelaskan tiga manfaat utama *e-government* bagi masyarakat, kalangan bisnis, dan pemerintahan itu sendiri, sebagai berikut:

- a. Bagi warga masyarakat memberikan manfaat setidaknya enam hal, yakni:
 - 1). Layanan penuh 24 jam dan 7 hari dalam seminggu;
 - 2). Ekonomis, tidak perlu kunjungan ke kantor layanan pemerintah;
 - 3). Layanan yang cepat dan efisien karena dilakukan secara elektronik;
 - 4). Transparan, tidak terjadi percaloan dan pungutan tidak resmi;
 - 5). Berkeadilan, setiap warga memiliki hak yang sama dalam mengakses layanan;
 - 6). Kenyamanan, warga tidak perlu keluar rumah dalam mengakses layanan pemerintah.
- b. Bagi kalangan bisnis dapat memberikan manfaat sebagai berikut:
 - 1). Mengurangi waktu dalam menyiapkan administrasi bisnis yang harus disiapkan;
 - 2). Mengarahkan bisnis berjalan secara *online* melalui *e-business* dan *e-commerce*.
 - 3). Kesesuaian yang lebih baik bagi peraturan dan regulasi pemerintah dengan iklim bisnis.
 - 4). Bekerjasama dengan pemerintah dalam bisnis akan lebih transparan dan nyaman melalui *e-procurement*;
 - 5). Pengawasan terhadap peredaran barang akan lebih baik dengan pengawasan perizinan secara *online*.
 - 6). Mengarahkan transaksi keuangan berjalan secara *on-line* melalui *e-banking* atau *e-payment*.
- c. Bagi sesama pemerintah juga akan memberikan manfaat dalam hal:
 - 1). Pembuatan peraturan dan kebijakan memberikan hasil yang lebih baik dengan informasi yang selalu terbaru;
 - 2). Perolehan, penyimpanan, dan pengembalian data berjalan cepat yang mengarah pada pengambilan keputusan yang lebih baik;
 - 3). Proses manajemen pemerintahan yang lebih baik;
 - 4). Penyebarluasan informasi tentang peraturan, kebijakan, dan pemerintahan menjadi lebih baik;
 - 5). Kinerja peraturan dalam perpajakan menjadi lebih baik;
 - 6). Kinerja peraturan dalam sektor sosial, seperti pendidikan, kesehatan, dan keamanan menjadi lebih baik;
 - 7). Memberikan citra positif sebagai pemerintahan yang maju dan modern.

Menurut Richard Heeks, terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi suksesnya pengembangan e-gov, yakni sebagai berikut:

- a. Adanya dorongan dari luar pemerintahan, misal masyarakat pengguna.
- b. Adanya dorongan dari pemegang kekuasaan dalam mewujudkan keterlaksanaan *e-government*.
- c. Sejalan dengan visi dan strategi *good Governance*.
- d. Project manajemen e-gov yang efektif.
- e. Dukungan dan komitmen dari ownership dan stakeholder menyikapi E-Gov, dalam hal ini adalah Pemda, DPRD, dan masyarakat.
- f. Desain yang efektif dilihat dari sudut pandang kebutuhan pengguna.
- g. Mempunyai kompetensi SDM yang handal dibidang IT dan administrasi pemerintahan.
- h. Sejalan dengan pengembangan teknologi infrastruktur.

6. Kebijakan Pemerintah

Keinginan pemerintahan untuk mengimplementasikan *e-government* telah dituangkan dalam Kebijakan pemerintah tentang pengembangan e-gov dituangkan dalam bentuk **Inpres RI Nomor 3 Tahun 2003**, "Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Gov". Dan Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika, yakni Kepmen Nomor 57/Kep/M.Kominfo/12/2003, Panduan Penyusunan Rencana Induk Pengembangan E-Gov. Strategi nasional penerapan e-gov di Indonesia sendiri akan dilaksanakan dalam empat tahapan, yaitu: Tingkat Persiapan, Tingkat Pematangan, Tingkat Pemanfaatan dan Tingkat Pemanfaatan. Bertahapnya pelaksanaan e-gov itu sendiri memper-timbangkan beberapa kondisi yaitu: prioritas layanan elektronik yang diberikan, kondisi infrastruktur yang dimiliki, kondisi kegiatan layanan saat ini, dan kondisi anggaran dan sumber daya manusia yang dimiliki.

2.2 Kerangka Pemikiran

Untuk mengidentifikasi dan mengukur jenis isi (*content type*) yang terdapat pada situs pemerintah daerah perlu dikembangkan suatu coding instrument. *Coding instrument* pada penelitian ini mengacu pada *coding instrument* yang dibuat pada penelitian Zhou (2004). Penelitian ini mereplikasi penelitian analisa isi terhadap situs pemerintah daerah yang dilakukan Zhou di Cina. Terdapat tiga kategori koding utama yaitu tiga tipe utama e-government: *e-governance*, *e-service*, dan *e-knowledge*. Selain isi yang terdapat pada halaman

utama, *hyperlinks* yang meliputi *text link*, *image links*, *navigation bars*, yang tertera pada halaman utama, juga akan dimasukkan dalam koding. Hyperlinks yang hanya menunjukkan fungsi situs (seperti pilihan bahasa, *bookmarks*, tambahan web lainnya) tidak dikoding sebagai fungsi *e-government*, karena masalah desain situs bukan tujuan pembahasan dalam penelitian ini. Karena penelitian bersifat eksploratif, dalam koding instrumen dimasukkan kategori "lain-lain" untuk meng-koding fungsi yang tidak terduga sebelumnya.

3. METODE PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian

Penelitian ini didesain untuk mengeksplorasi profil situs pemerintah daerah di wilayah kerja BPPI Wilayah II. Sehingga penelitian ini menggunakan desain *explorative methods*, yakni pendekatan penelitian dengan melakukan penelusuran (eksplorasi) terhadap permasalahan yang diteliti. Untuk memperoleh cakupan informasi sesuai tujuan penelitian ini digunakan tiga pendekatan sekaligus yaitu pertama analisa isi (*content analysis*), lalu penilaian juri/panelis, dan ditambah wawancara mendalam (*in depth interview*). Analisa isi merupakan instrumen penelitian utama, sedangkan penilaian juri/panelis dan wawancara mendalam digunakan untuk melengkapi temuan analisa isi.

1. **Analisa Isi (*Content Analysis*)**, yakni dengan melakukan analisa isi terhadap halaman pertama (*home page*) pada situs pemerintah daerah secara serentak. Walizer dan Wiener (dalam Wimmer & Dominick: 1983) mendefinisikan analisa isi sebagai setiap prosedur sistematis yang direncanakan untuk menilai isi dari rekaman informasi. Menurut Kerlinger (1973), analisa isi ialah suatu metode tentang pengkajian dan analisa komunikasi dengan cara yang sistematis, obyektif, dan kuantitatif yang bertujuan untuk mengukur variabel. Untuk *coding instrument* yang digunakan dalam penelitian direplikasi dari studi analisa isi yang dilakukan oleh Zhou (2004) tentang content situs web pemerintah daerah di Cina.
2. **Penilaian Juri/Panelis**, yakni penilaian dari lima orang panelis yang memiliki kompetensi di bidang IT dengan latar belakang berbeda, yang terdiri atas 2 orang praktisi, 2 orang akademisi, dan 1 orang wartawan. Para panelis tersebut diminta melakukan pengamatan secara terpisah terhadap situs-situs yang dimiliki oleh pemerintahan daerah di empat provinsi. Pengamatan menggunakan parameter yang sama sehingga dapat dikuantifikasi penilaian dari kelima panelis tersebut. Hasil observasi berupa penilaian kuantitatif terhadap *content* situs pemerintah daerah secara keseluruhan.
3. **Wawancara Mendalam (*In Depth Interview*)**, yakni berupa wawancara mendalam untuk mendapatkan informasi dari sisi pengelola situs (*content e-gov*) pemerintahan daerah di 4 provinsi. Informasi yang digali terkait dengan sejarah pendirian, kuantitas dan kualitas situs pemerintah daerah (*content e-gov*), hingga rencana pengembangan.

3.2 Lokasi Penelitian

Penelitian dilaksanakan di Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Bangka Belitung, Provinsi Jambi, dan Provinsi Bengkulu, sesuai dengan wilayah kerja BPPI Jakarta. Metode analisa isi dan penilaian panelis dilaksanakan di DKI Jakarta, dengan alasan kepraktisan yakni enumerator analisa isi dan para panelis lebih banyak tinggal di wilayah Jakarta. Sementara pelaksanaan in-depth interview terhadap di empat provinsi, karena wawancara dilakukan terhadap pengelola *e-government* pemerintah daerah di empat provinsi tersebut. Wawancara terhadap pengelola *e-government* dilakukan paling awal yakni tanggal 28 Juni hingga 6 Juli 2007. Sedangkan pelaksanaan *coding* untuk *content analysis* dilakukan pada tanggal 8 Agustus 2007. Dan penilaian panelis berlangsung mulai tanggal 13 Agustus hingga 15 September 2007.

3.3 Populasi dan Sampel

Semua situs pemerintah daerah yang berada di empat provinsi dijadikan populasi penelitian. Berdasarkan situs resmi pemerintah (www.indonesia.go.id) terdapat 20 (dua puluh) buah situs pemerintah daerah yang berada di provinsi DKI Jakarta, Bengkulu, Jambi, dan Bangka Belitung, dan semuanya dijadikan sebagai sampel penelitian. Pada saat pelaksanaan coding yaitu tanggal 8 Agustus 2007, hanya 12 buah situs yang aktif dan dapat di-coding dari 20 buah situs pemerintah daerah yang telah ditentukan. Sisanya terdapat 8 buah situs pemerintah daerah yang non-aktif atau bertuliskan *Under Construction*. Situs-situs tersebut yaitu:

Tabel 3.1 Populasi Situs Pemda

NO.	Nama Situs	Provinsi	Keterangan
1.	www.jakarta.go.id	DKI Jakarta	Aktif
2.	pusat.jakarta.go.id	DKI Jakarta	Aktif
3.	selatan.jakarta.go.id	DKI Jakarta	Aktif
4.	timur.jakarta.go.id	DKI Jakarta	Aktif
5.	utara.jakarta.go.id	DKI Jakarta	Aktif
6.	kpti.barat.jakarta.go.id	DKI Jakarta	<i>Under-Construction</i>
7.	www.bengkulu.go.id	Bengkulu	Aktif
8.	www.bengkulu-selatan.go.id	Bengkulu	<i>Under-Construction</i>
9.	www.pempropjambi.go.id	Jambi	Aktif
10.	www.kotajambi.go.id	Jambi	Aktif
11.	www.muarojambi.go.id	Jambi	Aktif
12.	www.tanjabtjm.go.id	Jambi	<i>Under-Construction</i>
13.	www.pemkab-tanjungjabungbarat.go.id	Jambi	<i>Under-Construction</i>
14.	www.tebo.go.id	Jambi	Aktif
15.	www.sarolangun.go.id	Jambi	<i>Under-Construction</i>
16.	www.merangi.go.id	Jambi	<i>Under-Construction</i>
17.	www.kerincijambi.go.id	Jambi	<i>Under-Construction</i>
18.	www.bungo.go.id	Jambi	<i>Under-Construction</i>
19.	www.bangkabelitungprov.go.id	Bangka Belitung	Aktif
20.	www.pangkalpinang.go.id	Bangka Belitung	Aktif

Kedupuluh situs itu pun yang dinilai oleh lima panelis dengan parameter yang sama namun dilakukan secara terpisah. Berbeda dengan *coding* pada *content analysis* dilakukan oleh tiga enumerator secara bersama-sama di satu lokasi. Enumerator berasal dari latar belakang kalangan akademis (pasac sarjana) di bidang komunikasi. Nama panelis dan enumerator yang bekerja sama dalam penelitian ini ditampilkan pada lembar lampiran. Adapun untuk wawancara mendalam diambil dua orang dari setiap pengelola situs pemerintah daerah, jadi terdapat 12 orang yang menjadi narasumber pada metode ini. Yang berhak menjadi narasumber yaitu kepala pengelola situs dan pejabat tingkat teknis (operator) supaya dapat memberikan penjelasan yang mendalam dan komprehensif.

3.4 Unit Analisa

Menganalisa situs web memiliki tingkat kesulitan yang lebih dibanding analisa isi umum yang digunakan pada media cetak (McMillan, 2000). Meski demikian, kesulitan itu dapat diatasi dengan perencanaan yang matang seperti dalam hal pengambilan sampel, reliabilitas antar coder, dan unit analisa. Yang menjadi unit analisa utama pada penelitian ini adalah "halaman utama/*home page*" atau halaman pembuka yang terdapat pada suatu situs. Dengan menggunakan halaman utama sebagai unit analisa, berbagai situs dengan beragam ukuran dapat diperbandingkan secara efektif.

Dua orang peneliti *websites content management*, Ha dan James melaporkan bahwa *web techniques* memperkirakan halaman sebuah situs itu sangat bervariasi, yakni mulai satu halaman hingga 50.000 halaman. Sehingga mereka berargumentasi bahwa meng-*coding* seluruh halaman situs dapat sangat menghabiskan waktu dan menimbulkan bias karena ukuran situs. Lebih lanjut, halaman utama merupakan pusat dari komunikasi berbasis situs karena menyajikan sejenis "pintu depan" untuk masuk kepada semua pesan yang terdapat dalam situs. Hampir semua pengunjung sebuah situs memutuskan apakah mereka akan meneruskan *browsing* di situs tersebut berdasarkan kesan mereka terhadap tampilan yang disajikan pada halaman utama (Ha & James, 1998).

3.5 Coding Protocol

Untuk memahami dengan seksama bagaimana pemerintah daerah di berbagai tingkatan di empat provinsi menggunakan berbagai sumber daya yang tersedia di internet, pelaksanaan *coding* dilakukan dengan menghitung frekuensi setiap item yang terdapat pada *coding instrument*. Melalui *coding* tersebut, selain

mengetahui jumlah item *e-government* yang muncul, dapat pula diketahui seberapa penting informasi tersebut sehingga dimunculkan oleh pengelola *e-government*.

Pada saat pelaksanaan *coding*, dilakukan modifikasi/penyesuaian dengan memberikan penambahan pada beberapa item *e-government*. Modifikasi tersebut yaitu penambahan sub-kategori informasi lelang pada kategori layanan non-interaktif, dan penambahan sub-kategori profil pemda dan info legislatif pada kategori informasi dari pemerintah. Hal ini dilakukan karena adanya item-item dari *coding instrument* versi Zhou (2004) yang kurang cocok bila dimasukkan dalam kategori dan sub-kategori yang telah disediakan.

3.6 Reliabilitas Instrumen

Reliabilitas berhubungan dengan ketepatan alat ukur. Dalam reliabilitas kategori ditujukan pada derajat kemampuan pengulangan penempatan data dalam berbagai kategori yang secara integral berhubungan dengan pemberian kode oleh enumerator. Menurut Krippendorff (1980), tujuan pengujian kehandalan atau reliabilitas adalah memantapkan apakah data yang diperoleh dalam penelitian dapat memberikan suatu dasar yang dapat dipercaya untuk menarik kesimpulan, membuat rekomendasi, mendukung keputusan atau menerima sesuatu sebagai fakta.

Krippendorff (1980) menjelaskan, koefisien reliabilitas antar enumerator dan reliabilitas komposit yang lebih besar dari 0,8 (80%) antar enumerator dapat diterima sebagai kepercayaan yang memadai atau dapat terandalkan. Nilai yang kurang dari 0,7 (70%) cenderung tidak signifikan secara statistik. Ini artinya, seandainya reliabilitas komposit lebih besar dari 80%, pengkategorian yang dilakukan peneliti dinyatakan sah, sementara bila kurang berarti tidak sah. Dikarenakan penelitian analisa isi ini mereplikasi penelitian analisa isi situs pemda di Cina oleh Zhou (2004), penghitungan reliabilitas antar enumerator tidak dilaksanakan. Reliabilitas antar-enumerator pada studi yang dilakukan Zhou menghasilkan koefisien Holsti sebesar **0.91**.

3.7 Metode Analisa Data untuk Content Analysis

Setelah data yang dibutuhkan terkumpul, selanjutnya dilakukan pengolahan data berupa proses *data entry* dan *tabulation* agar data menjadi lebih mudah dimanfaatkan dalam analisa data untuk menjawab tujuan penelitian. Pengolahan dan analisa data menggunakan piranti lunak statistik modern yakni SPSS *versi 14.0 for windows*. Prosedur pengolahan dan analisa data akan dilakukan dalam dua prosedur, yakni:

1. *Statistik deskriptif* merupakan prosedur awal analisa data untuk memberikan gambaran umum tentang karakteristik umum. Statistik deskriptif pada penelitian ini akan dilakukan untuk menggambarkan karakteristik tipologi *content e-gov* dengan menggunakan tabel frekuensi.
2. *Statistik inferensial* merupakan prosedur lanjutan untuk memperoleh perbedaan antar variabel amatan di empat provinsi. Uji statistik yang digunakan adalah statistik non-parametrik *Friedman Test* untuk menguji perbedaan pada variabel penelitian.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Rangkuman Coding Isi Situs 12 Situs Pemerintah Daerah

Setelah data yang dikumpulkan pada proses *coding* ditabulasikan dalam tabel frekuensi, selanjutnya data dianalisa dengan uji statistik. Bab ini membahas hasil analisa data dengan menggunakan uji statistik nonparametrik *Friedman Test*. Hasil uji statistik akan menjelaskan ada-tidaknya perbedaan pada setiap kategori *e-government*, dan memberikan urutan/ranking kategori *e-government*. Pada Tabel 4.1 menggambarkan rangkuman hasil *coding* isi 12 situs pemerintah daerah di 4 provinsi. Tampak secara ukuran halaman utama, beberapa situs seperti pemprov DKI Jakarta, pemkot Jakarta Timur, Pemkot Pangkal Pinang, ukuran halaman sudah cukup besar dengan lebih dari 80- item. Komposisi fungsi *e-governance* terbanyak ada di situs pemprov Bengkulu, lalu fungsi *e-service* terbanyak ada di situs pemkot Jakarta Pusat, dan fungsi *e-knowledge* terbanyak berada di pemkot Jakarta Timur. Secara umum situs pemerintah daerah masih minim dalam fungsi *e-service*. Dan terdapat 8 situs yang timpang dalam menampilkan tiga fungsi utama

Tabel 4.1 Rangkuman Hasil Coding Isi Situs Pemerintah

NAMA SITUS PEMDA	Ukuran Halaman Utama (item)	FUNGSI E-GOVERNMENT				
		e-Governance	e-Service	e-knowledge	Fungsi e-gov lainnya	Fungsi web lainnya
www.jakarta.go.id	99	40.4%	24.2%	35.4%	-	-
www.pempropjambi.go.id	47	42.6%	4.3%	53.2%	-	-
www.bengkulu.go.id	14	57.1%	14.3%	28.6%	-	-
www.bangkabelitungprov.g	47	14.9%	2.1%	83.0%	-	-

o.id						
selatan.jakarta.go.id	55	16.4%	12.7%	70.9%	-	-
utara.jakarta.go.id	32	28.1%	-	71.9%	-	-
pusat.jakarta.go.id	39	5.1%	25.6%	69.2%	-	-
timur.jakarta.go.id	89	2.2%	5.6%	92.1%	-	-
www.kotajambi.go.id	48	29.2%	-	70.8%	-	-
www.muarojambi.go.id	52	32.7%	13.5%	53.8%	-	-
www.tebo.go.id	41	4.9%	22.0%	73.2%	-	-
www.pangkalpinang.go.id	83	32.5%	24.1%	43.4%	-	-

4.2. Isi Situs Pemerintah Daerah

Hasil penelitian ini menemukan bahwasanya situs pemerintah daerah sangat kaya akan informasi. Dua per tiga (62.3%) *hyperlink* yang terdapat pada situs pemerintah menyajikan informasi yang berasal dari pemerintah (fungsi *e-knowledge*). Sementara jumlah *hyperlink* yang dapat melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan pada pemerintah (fungsi *e-governance*) hanya seperempatnya (24.3%), dan *hyperlink* yang menyajikan layanan pemerintah secara *online* (fungsi *e-service*) hanya mencapai 13.4%.

**Tabel 5.1 Isi Situs Pemerintah Daerah
(Base: 12 Situs Pemerintah Daerah)**

Fungsi E-Government	Frekuensi	Persentase
<i>e-governance</i>	157	24.3%
<i>e-service</i>	87	13.4%
<i>e-knowledge</i>	402	62.3%
Fungsi e-gov lainnya	0	-
Fungsi web lainnya	0	-
Total	646	100%

Hasil uji statistik Friedman menunjukkan terdapat perbedaan yang nyata ($p < 0.05$) pada ketiga fungsi e-government. Fungsi e-knowledge menjadi kategori yang mendominasi tampilan isi halaman pertama situs pemerintah. Fungsi e-governance berada di tempat kedua, sementara fungsi e-service menduduki kategori terpenting ketiga.

**Tabel 5.2 Hasil Uji Friedman Pada Perbedaan Fungsi e-Government
($p < 0.05$, $df = 4$, $X^2 = 42.667$, $N = 12$)**

Fungsi e-government	Mean Rank
<i>e-governance</i>	3.92
<i>e-service</i>	3.08
<i>e-knowledge</i>	4.83
Fungsi e-gov lainnya	1.58
Fungsi web lainnya	1.58

5. KESIMPULAN

1. Dari hasil evaluasi secara langsung terhadap situs pemerintah daerah didapati masih adanya situs yang tidak aktif yang mengindikasikan lemahnya pengelolaan dan kebijakan. Hal ini memperlihatkan bahwa implementasi e-government belum terlaksana dengan sukses.
2. Profil isi situs Pemprov DKI Jakarta, Pemkot Jakarta Timur, Pemkot Pangkal Pinang, memiliki ukuran halaman sudah cukup besar dengan lebih dari 80 item. Komposisi fungsi e-governance terbanyak ada di situs pemprov Bengkulu, lalu fungsi e-service terbanyak ada di situs pemkot Jakarta Pusat, dan fungsi e-knowledge terbanyak berada di pemkot Jakarta Timur.
3. Didapatinya prosentase fungsi *e-knowledge* sebesar 62.3% dari keseluruhan fungsi e-gov yang didefinisikan, hal ini menandakan bahwa, fungsi situs pemerintah daerah berada dalam tahap 1 dan

belum memberikan banyak manfaat efektifitas dan efisiensi kepada pengguna. Jumlah hyperlink yang dapat melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan pada pemerintah (fungsi e-governance) hanya seperempatnya (24.3%) Dan hyperlink yang menyajikan layanan pemerintah secara online (fungsi e-service) hanya mencapai 13.4%.

6. DAFTAR PUSTAKA

- A Definition of E-Government*, 2007. The World Bank Group, diakses dari <http://www.worldbank.org/publicsector/egov/definition.html> [02/02/07].
- AGIMO, 2007. *Australian Government Online Project*. Diakses dari www.agimo.au
- BPPI II Jakarta, 2003. *Pemerintahan dan Telematika*: Inpres RI Nomor 3 Tahun 2003, Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Gov, Jakarta.
- Depkominfo, 2007. *Kondisi Situs Web Pemerintah Daerah*. Diakses dari <http://www.depkominfo.go.id/portal/?act=detail&mod=artikel&view=1&id=BRT060116124201> [11/05/07].
- Ha, L., & James, E.L. 1998. Interactivity Reexamined: A Baseline Analysis of Early Business Web Sites, *Journal of Broadcasting and Electronic Media*, 42(2), diakses dari www.findarticles.com [25/05/07].
- Heeks, Richard, 2003. *eGovernment for Development: Causes of eGovernment Success and Failure: Factor Model*, IDPM, University of Manchester, UK, 2003.
- Holsti, O.R., 1969. *Content Analysis for the Social Sciences and Humanities*, Philipines: Addison-Wesley Publishing Company, Inc.
- Huang, Zhenyu, 2006. E-Government Practices At Local Levels: An Analysis of U.S. Counties Websites, *Issues in Information Systems Volume VII No. 2*, diakses dari <http://www.iacis.org/pdf/Huang.pdf> [24/05/07].
- Huang Z. & Bwoma, P.O., 2003. An Overview of Critical Issues of E-Government, *Issues in Information Systems Volume IV No. 1*, diakses dari <http://www.iacis.org/pdf/Huang.pdf> [24/05/07].
- Indrajit, R.E., 2002. *Tiga Tantangan Besar Electronic Government*, diakses dari http://www.apjii.or.id/eko_indrajit/PDF%20COLLECTIONS/TigaTantanganEGovernment.pdf [11/05/07].
- Improvement & Development Agency (IDeA), 2002. *Local E-Government Now: A Worldwide View*, diakses dari <http://www.sap.com/solutions/industry/publicsector> [02/04/07].
- Kepmen Komunikasi dan Informatika Nomor 57/Kep/M.Kominfo/12/2003, *Panduan Penyusunan Rencana Induk Pengembangan E-Gov*.
- Kepmen Komunikasi dan Informatika Nomor: 55/Kep/M.Kominfo/12/2003 *Panduan Pembangunan Infrastruktur Portal Pemerintah*.
- Kerlinger, Fred N., 2004. *Asas-Asas Penelitian Behavioral* (Terj.), Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Krippendorff, K., 1980. *Content Analysis: An Introduction To Its Methodology*, Sage: Beverly Hills, CA.
- Kompas, 24/10/03. *Target E-Government 2005*. Diakses dari <http://kompas.com/kompas-cetak/0309/04/otonomi/541482.htm> [05/05/07].
- Kunjoro, Mudrajad, 2003. *Metode Riset untuk Bisnis dan Ekonomi: Bagaimana Meneliti dan Menulis Tesis?*, Jakarta: Erlangga.
- Memillan, S.J., 2000. The Microscope and The Moving Target: The Challenge of Applying Content Analysis To The World Wide Web, *Journalism And Mass Communication Quarterly*, 77(1). Diakses dari www.findarticles.com [02/02/07].
- Misra, D.C., 2006. *Defining E-Government: A Citizen-Centric Criteria-Based Approach*. Disampaikan pada 10th National Conference of E-Government, Februari 2-3 2006, India. Diakses dari <http://www.10thnationalegovconf.in/14.pdf> [05/05/07].
- Rahardjo, Budi, 2001. *Membangun E-Government*. Makalah dipresentasikan pada Seminar Nasional Jaringan Komputer II, yang diselenggarakan oleh Technic Study Club, STMIK Dipanegara Makassar, 19 Mei 2001. Diakses dari budi.insan.co.id/articles/e-gov-makassar.doc [11/05/07].
- Rakhmat, Jalaluddin. *Metode Penelitian Komunikasi*, Rosda Karya, Bandung, 2004.
- Singarimbun, Masri, dan Effendi, Sofian (Editor), 1996. *Metode Penelitian Survei*, Jakarta: LP3ES.
- Wimmer, R.D., & Dominick, J.R., 1983. *Mass Media Research: An Introduction*, California: Wadsworth Publishing Company.
- Watson, R.T. & Mundy, B., 2001. A Strategic Perspective of Electronic Democracy, *Communication of The ACM*, 44(1), 27-30.
- Zhou, Xiang, 2004. E-Government in China: A Content Analysis of National and Provincial Web Sites, *JCMC 9 (4) July 2004* diakses dari: [http://jcmc.indiana.edu/vol9/issue4/ zhou.html](http://jcmc.indiana.edu/vol9/issue4/zhou.html) [23/05/07].